

Pendidikan Multikultural, Pendidikan Kedamaian, dan Pendidikan Inklusif: Perbedaan dan Urgensinya di Indonesia

Rahma Awalia¹, Najamuddin², Alimin Alwi³, M. Yunasri Ridhoh⁴

Program Studi Magister PIPS, Universitas Negeri Makassar, Indonesia^{1,2,3}

Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Makassar, Indonesia⁴

*E-mail: awel.awalia94@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14-10-2025

Revised: 25-11-2025

Accepted: 25-11-2025

Keywords

pendidikan inklusif;
pendidikan kedamaian;
pendidikan multikultural

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji bagaimana pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif dipahami, dibedakan, serta diintegrasikan secara komplementer dalam konteks Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis isi terhadap literatur akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan titik tekan ketiga paradigma tersebut. Pendidikan multikultural menekankan penghargaan terhadap keragaman budaya dan identitas; pendidikan kedamaian berfokus pada pembentukan keterampilan resolusi konflik, toleransi, dan harmoni sosial; sedangkan pendidikan inklusif menjamin akses, partisipasi, dan lingkungan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekolah dan institusi pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti praktik diskriminasi berbasis identitas, kurangnya kapasitas guru dalam mengelola keberagaman, dan terbatasnya kebijakan operasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang damai dan inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut bukan hanya tuntutan normatif, tetapi kebutuhan strategis dalam merespons kompleksitas pluralitas Indonesia. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan kurikulum yang responsif terhadap keberagaman, peningkatan pelatihan guru terkait resolusi konflik dan pedagogi inklusif, serta pembangunan budaya sekolah yang menumbuhkan toleransi, solidaritas, dan kohesi sosial.

This study examines how multicultural education, peace education, and inclusive education are understood, differentiated, and complementarily integrated in the Indonesian context. Using a qualitative approach through literature review and content analysis of academic literature, research reports, and education policy documents, this study identifies the differences in the focus of these three paradigms. Multicultural education emphasises respect for cultural diversity and identity; peace education focuses on developing conflict resolution skills, tolerance, and social harmony; while inclusive education guarantees equal access, participation, and learning environments for all students. The results of the analysis show that schools and educational institutions in Indonesia still face challenges such as identity-based discrimination, a lack of teacher capacity in managing diversity, and limited operational policies to create a peaceful and inclusive learning environment. These findings confirm that the integration of these three approaches is not only a normative requirement but also a strategic necessity in responding to the complexity of Indonesia's plurality. In practical terms, this study recommends strengthening curriculum policies that are responsive to diversity, improving teacher training related to conflict resolution and inclusive pedagogy, and developing a school culture that fosters tolerance, solidarity, and social cohesion.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Awalia, R., Najamuddin, N., Alwi, A., Ridhoh, M. Y. (2025). Pendidikan Multikultural, Pendidikan Kedamaian, dan Pendidikan Inklusif: Perbedaan dan Urgensinya di Indonesia. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 47-66. doi: 10.35508/haumeni.v5i3.25190

PENDAHULUAN

Dinamika sosial di Indonesia yang ditandai oleh keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya menjadikan pendidikan sebagai arena penting dalam merawat kohesi sosial. Namun, fenomena intoleransi, diskriminasi, dan eksklusi sosial masih kerap muncul di ruang pendidikan, menunjukkan adanya problem mendasar dalam penerapan nilai-nilai multikultural, kedamaian, dan inklusivitas. Berbagai riset menunjukkan bahwa kekerasan simbolik, kultural, maupun struktural dalam praktik pendidikan seringkali mereproduksi ketidakadilan, terutama terhadap kelompok rentan dan minoritas (Banks, 2016; Nilan, 2019; Supriyanto, A., & Wulandari, 2021; Tilaar, 2004). Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keberagaman sebagai wacana, tetapi juga menghadirkan praktik nyata yang menumbuhkan saling pengakuan, penghargaan, dan kerja sama antarkelompok.

Pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif hadir sebagai respons teoretis sekaligus praksis untuk menjawab tantangan keberagaman di Indonesia. Namun, meski konsep-konsep ini sering diperbincangkan, penerapannya masih menghadapi hambatan serius di level kebijakan maupun praktik kelas. Banyak pendidik (guru-dosen) dan lembaga pendidikan masih memandang pendidikan multikultural sebatas perayaan budaya, pendidikan kedamaian hanya sebatas slogan, dan pendidikan inklusif terbatas pada isu disabilitas (Ainscow, M., & Miles, 2009; Banks, 2008; Galtung, 1996; Suparlan, 2018). Dengan demikian, ketiga paradigma ini belum sepenuhnya dipraktikkan secara integratif dalam sistem pendidikan nasional.

Permasalahan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana ketiga model pendidikan tersebut dibedakan, dan sejauh mana urgensinya untuk diterapkan secara berkelanjutan di Indonesia. Pada praktiknya, pendidikan multikultural menekankan pengelolaan perbedaan identitas budaya, pendidikan kedamaian menggarisbawahi transformasi konflik menuju harmoni, sementara pendidikan inklusif menuntut keterlibatan semua individu tanpa diskriminasi. Namun dalam konteks Indonesia, batas antara ketiganya sering kabur dan tumpang tindih, sehingga berimplikasi pada kebingungan implementasi di lapangan (Booth, T., & Ainscow, 2011; Hidayat, 2020; Johnson, D. W., & Johnson, 2005; Nieto, 2010). Hal ini menegaskan perlunya analisis kritis untuk memperjelas distingsi dan irisan ketiganya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana praktik pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif

dipahami dan dijalankan di Indonesia? Kedua, apa perbedaan prinsip, tujuan, dan strategi di antara ketiganya? Ketiga, bagaimana urgensi penerapan ketiganya secara komplementer dalam menjawab tantangan keberagaman sosial bangsa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar analisis tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan sampai pada pengayaan praksis pendidikan yang lebih transformatif.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis perbedaan dan urgensi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif dalam konteks Indonesia. Secara khusus, penelitian ini ingin memberikan peta konseptual yang dapat menjadi pedoman bagi pendidik, pengambil kebijakan, dan masyarakat dalam merancang strategi pendidikan yang humanis, demokratis, dan adil. Dengan cara ini, pendidikan diharapkan dapat lebih berperan dalam membentuk warga negara yang menghargai pluralitas sekaligus mampu menjaga perdamaian sosial (Abdi, A. A., & Shultz, 2008; Anderson, 2017; Fraser, 2000; Tilaar, 2012).

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa problem disintegrasi sosial di Indonesia kerap dipicu oleh kegagalan pendidikan dalam menanamkan nilai toleransi, resolusi konflik, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kerusuhan berbasis SARA, perkelahian antar kelompok mahasiswa, perundungan di lembaga pendidikan, hingga resistensi terhadap kelompok minoritas merupakan bukti nyata bahwa pendidikan yang ada belum sepenuhnya mampu menginternalisasikan nilai-nilai multikultural, damai, dan inklusif (Anwar, 2016; HAM, 2022; Hefner, 2000; Nilan, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pemahaman konseptual dan aplikatif di ranah pendidikan.

Studi-studi terdahulu sebetulnya telah banyak membahas pendidikan multikultural di Indonesia, tetapi dipahami secara partikular, tidak komparatif (Azra, 2007; Banks, 2009; Mahfud, 2011). Demikian pula, penelitian tentang pendidikan kedamaian masih lebih sering menekankan aspek kurikulum formal, bukan strategi transformatif yang menyentuh dinamika kehidupan siswa (Galtung, 2012; Harris, I. M., & Morrison, 2013; Sugiharto, 2017). Sementara itu, kajian pendidikan inklusif kerap terbatas pada isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tanpa melihat dimensi inklusivitas yang lebih luas, seperti gender, etnisitas, dan agama (Ainscow, 2000; Florian, 2014; Sunardi, 2018).

Gap penelitian yang dapat diidentifikasi adalah masih minimnya studi yang menghubungkan ketiga model pendidikan tersebut dalam satu kerangka analisis. Padahal, pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif memiliki titik temu yang sama, yakni membangun masyarakat yang setara, adil, dan harmonis. Namun, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga kajian integratif yang menekankan distingsi sekaligus

komplementaritasnya akan sangat penting untuk memperkaya literatur dan praktik pendidikan di Indonesia (Banks, 2017; Mahfud, 2020; Noddings, 2018; UNESCO., 2015).

Dengan berfokus pada perbedaan sekaligus urgensi penerapan pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis. Kontribusi teoretis berupa pengayaan literatur pendidikan di Indonesia yang selama ini masih terfragmentasi. Sedangkan kontribusi praktis adalah memberikan rekomendasi implementasi yang lebih menyeluruh bagi sekolah, perguruan tinggi, dan pembuat kebijakan dalam merancang program pendidikan yang relevan dengan konteks keberagaman bangsa (Dewey, 2016; Freire, 2018; Giroux, 2005; Supriyadi, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-integratif yang mengaitkan pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif dalam satu kerangka analisis konseptual yang utuh. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang membahas ketiganya secara parsial dan terpisah, pendidikan multikultural dalam konteks toleransi budaya, pendidikan kedamaian dalam kerangka resolusi konflik, serta pendidikan inklusif yang terbatas pada isu disabilitas, penelitian ini menghadirkan pemetaan analitis yang memperjelas perbedaan prinsip, tujuan, dan strategi dari ketiga model pendidikan tersebut sekaligus menunjukkan irisan filosofis dan praksis yang menghubungkannya. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru bahwa ketiga paradigma tidak hanya berdiri sendiri, tetapi dapat saling melengkapi sebagai satu kesatuan kerangka pedagogis untuk membangun kultur sekolah yang demokratis, humanis, dan berkeadilan sosial.

Selain memberikan kontribusi teoretis melalui konstruksi kerangka komplementer yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian pendidikan Indonesia, penelitian ini juga menawarkan nilai kebaruan praktis melalui identifikasi hambatan implementatif di sekolah, mulai dari kapasitas guru, gap kebijakan, hingga budaya institusi, yang selama ini jarang dibahas secara eksplisit dalam kajian serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting bagi pengembangan literatur akademik, tetapi juga strategis bagi pembangunan bangsa, terutama dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang mampu merawat keberagaman, mencegah konflik sosial, serta memastikan partisipasi setara bagi seluruh warga belajar dalam konteks Indonesia yang multikultural. Oleh karena itu, kajian komprehensif yang membedah perbedaan dan urgensinya di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengokohkan pendidikan sebagai instrumen utama menjaga kohesi sosial bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan analisis dokumen. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengkaji secara mendalam konsep, perbedaan, dan urgensi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, serta pendidikan inklusif dalam konteks Indonesia. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena mampu menggali makna, wacana, dan konstruksi sosial yang muncul dalam literatur dan praktik pendidikan (Creswell, J. W., & Poth, 2018; Moleong, 2019).

Penelitian ini menganalisis 34 dokumen akademik dan kebijakan pendidikan yang terdiri atas buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen resmi dari UNESCO dan Kementerian Pendidikan. Literatur tersebut dipilih berdasarkan tiga kriteria utama: **relevansi** tematik dengan pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif; kontribusi teoretis atau empiris terhadap pengembangan model pendidikan; serta keterkaitan langsung dengan konteks kebijakan pendidikan Indonesia. Dengan demikian, sumber-sumber yang digunakan tidak hanya mencerminkan kerangka konseptual global, tetapi juga dinamika pendidikan nasional.

Sebaran periode terbit literatur menunjukkan bahwa kajian paling dominan berasal dari rentang 2015–2018, sebuah fase ketika isu keragaman, konflik sosial, dan pendidikan inklusif menjadi fokus penting dalam wacana global maupun nasional. Namun demikian, literatur klasik dan pijakan awal seperti karya (Banks, 2009; Galtung, 1996; Tilaar, 2004) serta dokumen-dokumen kebijakan sejak tahun 2000-an tetap disertakan untuk memastikan kontinuitas perkembangan konsep. Sementara itu, sumber-sumber terbaru terbitan 2019 hingga 2024 digunakan untuk menangkap perkembangan mutakhir dalam kebijakan pendidikan, seperti Profil Pelajar Pancasila, SDGs 2030, serta arah kurikulum berbasis karakter dan inklusi sosial.

Secara topikal, literatur yang dianalisis terbagi ke dalam tiga fokus besar yang saling berkaitan namun memiliki penekanan berbeda. Literatur pendidikan multikultural, kemudian literatur pendidikan kedamaian, serta literatur pendidikan inklusif. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memasukkan literatur pendukung terkait modal sosial, kewargaan, dan strategi pembangunan manusia yang menjadi landasan normatif bagi integrasi ketiga pendekatan tersebut.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah tema, konsep, dan narasi utama dalam literatur. Langkah analisis mencakup: (1) reduksi data dengan memilah literatur yang sesuai fokus penelitian, (2) penyajian data dalam bentuk tema besar terkait perbedaan dan urgensi pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif, serta (3) penarikan kesimpulan berdasarkan temuan literatur. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari jurnal, buku akademik, dan laporan kebijakan. Selain itu, dilakukan *peer debriefing* melalui diskusi dengan akademisi bidang pendidikan untuk meminimalkan bias interpretasi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis studi pustaka, sehingga tidak menggambarkan data empiris langsung dari praktik di lapangan. Meski demikian, penelitian ini tetap

memberikan kontribusi teoretis yang penting dengan menyajikan analisis integratif yang selama ini belum banyak dilakukan dalam literatur pendidikan Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pendidikan Multikultural, Pendidikan Kedamaian, dan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Pendidikan multikultural di Indonesia tidak lahir begitu saja, kemunculannya dilandasi oleh realitas masyarakat yang majemuk, di mana perbedaan etnis, agama, bahasa, dan budaya kerap menjadi sumber konflik maupun kekuatan integrasi. Menurut Tilaar (2004), pendidikan multikultural hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengakuan identitas sekaligus perekat sosial dalam sistem pendidikan nasional. Banks (2015) menegaskan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya sebatas pengenalan keragaman, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kurikulum, pedagogi, dan kebijakan sekolah. Sementara itu, Abdullah (2018) menyoroti bagaimana pendidikan multikultural di Indonesia kerap terkendala oleh dominasi nilai mayoritas yang mengaburkan suara kelompok minoritas. Dengan demikian, praktik pendidikan multikultural di Indonesia masih berproses menuju bentuk yang lebih dialogis dan setara.

Dalam praktiknya, pendidikan multikultural sering diwujudkan melalui pembelajaran berbasis nilai toleransi, dialog antaragama, serta pengakuan terhadap budaya lokal. Hasil penelitian Suparlan (2018) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia cenderung menerapkan pendidikan multikultural dalam bentuk seremonial seperti perayaan hari besar keagamaan atau festival budaya. Namun, Nieto (2010) mengingatkan bahwa praktik semacam ini belum menyentuh aspek struktural, seperti kesetaraan akses pendidikan bagi kelompok minoritas. Bahkan menurut Azra (2007), kebijakan pendidikan nasional seringkali lebih menekankan pada uniformitas ketimbang keragaman, sehingga pendidikan multikultural masih lebih kuat pada tataran retorika dibanding praktik nyata.

Sementara itu, pendidikan kedamaian di Indonesia berkembang sebagai respon terhadap pengalaman konflik sosial dan politik, baik dalam skala lokal maupun nasional. Sebagaimana dijelaskan Galtung (1996), pendidikan kedamaian bukan sekadar meniadakan kekerasan fisik, tetapi juga membangun struktur sosial yang adil dan menghindari diskriminasi. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2015) di beberapa sekolah pascakonflik Maluku menunjukkan bahwa integrasi nilai perdamaian ke dalam kurikulum mampu menumbuhkan sikap rekonsiliatif di kalangan siswa. Selain itu, UNESCO (2014) mendorong pendidikan kedamaian sebagai bagian integral dari *Global Citizenship Education* yang menekankan keterampilan resolusi konflik, empati, dan dialog antarbudaya. Di Indonesia, program-program seperti Pendidikan Perdamaian Berbasis Komunitas juga telah dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat.

Namun, pendidikan kedamaian di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Menurut Suyatno (2017), kurikulum nasional belum memberikan ruang yang memadai untuk mengintegrasikan materi kedamaian secara sistematis, sehingga inisiatif lebih banyak datang dari sekolah atau komunitas tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan Bajaj (2015) yang menyatakan bahwa pendidikan kedamaian di

negara-negara berkembang sering bergantung pada dukungan internasional atau LSM, bukan kebijakan negara. Selain itu, faktor politik dan kepentingan elite juga sering menghambat upaya menanamkan nilai kedamaian dalam pendidikan (Haryanto, 2018). Akibatnya, pendidikan kedamaian di Indonesia masih lebih banyak berkembang di wilayah-wilayah yang pernah mengalami konflik, sementara di wilayah lain kurang terlembagakan.

Di sisi lain, pendidikan inklusif di Indonesia berangkat dari komitmen untuk memberikan akses pendidikan bagi semua, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ainscow (2000) menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah transformasi sistem pendidikan agar dapat melayani keberagaman siswa tanpa diskriminasi. Implementasi kebijakan ini di Indonesia mendapat dorongan melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, meski dalam praktiknya masih banyak hambatan. Hasil penelitian Sunardi (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum memiliki tenaga pendidik yang terlatih dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan.

Kendala utama dalam pendidikan inklusif di Indonesia antara lain keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pemahaman guru, serta resistensi sosial dari orang tua maupun masyarakat. Florian (2014) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh sikap dan kapasitas guru, bukan sekadar regulasi. Studi dari UNICEF (2018) mengungkap bahwa stigma terhadap anak berkebutuhan khusus masih menjadi faktor utama yang menghambat implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Lebih lanjut, hasil riset Mulyadi (2019) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah inklusif di Indonesia yang mampu menyediakan dukungan individualisasi pembelajaran secara konsisten. Ini menandakan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan, pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif memiliki titik temu pada upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil, humanis, dan demokratis. Banks (2015) melihat pendidikan multikultural sebagai jalan untuk membangun keadilan sosial melalui penghargaan terhadap keragaman. Galtung (1996) menekankan pendidikan kedamaian sebagai sarana membangun relasi sosial yang bebas dari kekerasan struktural. Sementara itu, Ainscow, M., & Miles (2009) menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah mekanisme menghapus diskriminasi dalam akses pendidikan. Ketiganya berangkat dari konteks yang berbeda, tetapi memiliki tujuan bersama: menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia.

Perbedaan mendasar terletak pada titik fokus masing-masing pendekatan. Pendidikan multikultural lebih menekankan pada pengakuan identitas budaya dan toleransi; pendidikan kedamaian berorientasi pada pencegahan konflik dan pembangunan harmoni sosial; sementara pendidikan inklusif berfokus pada akses dan partisipasi semua anak tanpa terkecuali. Sebagaimana ditegaskan Nieto (2010), pendidikan multikultural harus berangkat dari kesetaraan budaya, sementara Bajaj (2015) menekankan pendidikan kedamaian sebagai instrumen transformasi konflik. Di sisi lain, Florian (2014) menggarisbawahi bahwa pendidikan inklusif tidak dapat berjalan tanpa perubahan paradigma guru dan

masyarakat. Perbedaan orientasi inilah yang justru dapat dipadukan untuk memperkaya sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks Indonesia, integrasi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi merupakan kebutuhan paradigmatik yang harus diwujudkan melalui desain kebijakan pendidikan yang lebih sistematis. Tantangan implementatif memang masih terlihat jelas, terutama karena pluralitas masyarakat Indonesia yang sering dipersepsikan sebagai potensi disintegrasi alih-alih kekuatan sosial Azra (2007), sejarah konflik yang membuat pendidikan kedamaian berjalan reaktif bukan preventif (Cahyono, 2015), serta ketidaksetaraan akses pendidikan yang masih meminggirkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (UNICEF, 2018).

Namun, temuan-temuan tersebut justru mempertegas bahwa integrasi ketiganya tidak dapat lagi diposisikan sebagai wacana tambahan, melainkan harus menjadi fondasi kurikulum nasional, budaya sekolah, serta standar kompetensi pendidik. Dengan demikian, posisi artikel ini menegaskan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui dua ranah: pertama, pada tingkat konsep melalui penyusunan kerangka kebijakan pendidikan yang multidimensi dan berorientasi keadilan sosial; dan kedua, pada tingkat praktik melalui transformasi pedagogi, pelatihan guru, serta ekosistem sekolah yang menjamin interaksi setara, pengelolaan konflik secara konstruktif, dan penghargaan terhadap keberagaman. Integrasi ini bukan sekadar pilihan normatif, tetapi strategi struktural untuk memperkuat karakter pendidikan Indonesia yang relevan dengan realitas sosial bangsa.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan tingkat implementasi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan berbagai studi (Sunardi, 2018; Suparlan, 2018)

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Pendidikan

Pendekatan Pendidikan	Fokus Utama	Implementasi di Indonesia	Tantangan Utama
Multikultural	Identitas, toleransi	Lebih banyak seremonial	Kurikulum normatif, bias mayoritas
Kedamaian	Resolusi konflik, harmoni	Parsial, pascakonflik	Kurang dukungan kebijakan, politisasi
Inklusif	Akses tanpa diskriminasi	Terbatas di sekolah atau kampus pilot	Sarana minim, guru-dosen belum terlatih, stigma

Perbedaan Prinsip, Tujuan, dan Strategi Pendidikan Multikultural, Kedamaian, dan Inklusif

Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif sama-sama berangkat dari semangat pengakuan terhadap keberagaman, tetapi memiliki titik tekan yang berbeda. Pendidikan multikultural lebih fokus pada penghargaan terhadap perbedaan budaya, etnis, dan agama; pendidikan kedamaian menekankan resolusi konflik, empati, dan penghindaran

kekerasan; sedangkan pendidikan inklusif berfokus pada akses dan partisipasi setara bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas (Banks, 2015; Tilaar, 2004; UNESCO, 2020). Perbedaan ini penting dipahami agar kebijakan dan praktik pendidikan tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam membangun masyarakat demokratis.

Prinsip pendidikan multikultural bertumpu pada ide pengakuan terhadap keragaman identitas budaya tanpa diskriminasi. Prinsip utama pendidikan kedamaian adalah membangun keterampilan resolusi konflik dan non-kekerasan. Sementara pendidikan inklusif berdiri di atas prinsip kesetaraan akses, partisipasi, dan keadilan bagi setiap peserta didik. Dengan demikian, multikultural lebih pada “hidup bersama dalam perbedaan”, kedamaian pada “mengelola perbedaan tanpa kekerasan”, dan inklusif pada “memastikan tidak ada yang tertinggal” (Banks, 2015; Galtung, 1996).

Tujuan ketiga pendidikan tersebut menurut Nieto (2010); UNESCO (2020); Booth, T., & Ainscow (2011) juga berbeda secara spesifik. Pendidikan multikultural bertujuan menumbuhkan sensitivitas budaya, toleransi, dan penghargaan atas pluralitas. Pendidikan kedamaian mengarah pada terciptanya budaya damai yang menolak kekerasan dalam bentuk apa pun. Sementara pendidikan inklusif menghendaki setiap anak, tanpa kecuali, dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Perbedaan tujuan ini membuat implementasi ketiga pendekatan tersebut memerlukan strategi yang khas agar efektif.

Strategi pendidikan multikultural biasanya diwujudkan melalui integrasi materi tentang keragaman budaya dalam kurikulum, pembelajaran kolaboratif lintas kelompok, serta praktik diskusi kritis tentang isu sosial-budaya. Sebaliknya, pendidikan kedamaian lebih banyak menggunakan metode simulasi resolusi konflik, dialog antaragama, role play, serta latihan empati. Sedangkan pendidikan inklusif menekankan penyesuaian metode pembelajaran, kurikulum diferensiatif, dan dukungan fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Dalam konteks yang lebih luas, ketiga strategi ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka manajemen warganegara (*citizenship management*) yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan nilai, perilaku, dan partisipasi warga dalam menghadapi kompleksitas sosial.

Ridhoh, M. Y., et al (2024) menegaskan bahwa manajemen warganegara merupakan konsep strategis untuk membangun resiliensi kebangsaan di tengah arus VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural, pendidikan damai, dan pendidikan inklusif sebagai satu kesatuan praksis kewargaan yang adaptif dan reflektif. Dengan demikian, strategi pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian nilai, tetapi juga pada pembentukan kapasitas warga negara yang mampu mengelola keberagaman, berpartisipasi secara deliberatif, serta membangun kohesi sosial yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

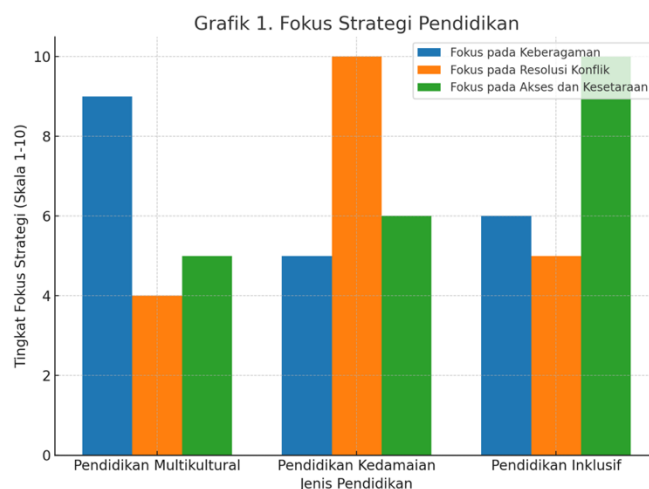
Tabel 2. Perbedaan Prinsip, Tujuan, dan Strategi

Aspek	Pendidikan Multikultural	Pendidikan Kedamaian	Pendidikan Inklusif
Prinsip	Pengakuan keragaman budaya dan identitas	Non-kekerasan, resolusi konflik, empati	Kesetaraan akses, partisipasi, keadilan
Tujuan	Toleransi dan apresiasi pluralitas	Budaya damai dan resolusi konflik	Semua anak dapat belajar tanpa diskriminasi
Strategi	Integrasi kurikulum, diskusi lintas budaya	Role play, dialog, simulasi resolusi konflik	Kurikulum adaptif, dukungan fasilitas

Dalam praktiknya, menurut Banks (2015); UNESCO (2020); Sunardi (2018) pendidikan multikultural seringkali masih terkendala bias mayoritas. Misalnya, kurikulum lebih menonjolkan budaya dominan dibandingkan budaya minoritas. Hal ini berbeda dengan pendidikan kedamaian yang justru menuntut adanya pengakuan setara bagi setiap pihak dalam konflik. Sementara pendidikan inklusif berhadapan dengan tantangan aksesibilitas sarana pembelajaran, terutama di daerah pedesaan.

Perbedaan mendasar juga terlihat dari kerangka filosofis yang melandasi ketiga pendekatan. Pendidikan multikultural berakar dari teori keadilan sosial dan demokrasi partisipatif, pendidikan kedamaian dipengaruhi filsafat humanisme dan non-kekerasan, sedangkan pendidikan inklusif berkembang dari paradigma hak asasi manusia dan non-diskriminasi. Pemahaman ini penting agar pendidik mampu merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan konteks sosial di Indonesia.

Strategi evaluasi pun berbeda. Pendidikan multikultural dievaluasi melalui indikator penerimaan dan toleransi antar kelompok, pendidikan kedamaian melalui penurunan potensi konflik dan peningkatan keterampilan mediasi, sedangkan pendidikan inklusif melalui keterlibatan aktif semua peserta didik tanpa hambatan. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan tidak sama, meskipun semuanya berkontribusi terhadap kohesi sosial.



Grafik 1. Fokus Strategi Pendidikan

Meskipun berbeda, ketiga pendekatan ini saling melengkapi. Pendidikan multikultural tanpa pendidikan kedamaian berpotensi menghasilkan apresiasi perbedaan tanpa keterampilan mengelola konflik. Sebaliknya, pendidikan kedamaian tanpa basis multikultural berisiko bersifat normatif tanpa menyentuh realitas keragaman. Pendidikan inklusif tanpa keduanya bisa menjadi teknis belaka tanpa menyentuh aspek nilai dan relasi sosial (Nieto, 2010; Tilaar, 2004; UNESCO, 2020).

Perbedaan strategi ini juga menggambarkan relevansinya terhadap kelompok sasaran. Pendidikan multikultural lebih ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat luas, pendidikan kedamaian untuk komunitas yang rentan konflik, dan pendidikan inklusif untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Konteks Indonesia yang multi-etnis, rawan konflik horizontal, dan masih menghadapi diskriminasi terhadap difabel, menjadikan ketiga pendekatan ini sangat strategis jika digabungkan.

Secara kelembagaan, pendidikan multikultural biasanya masuk melalui kurikulum umum dan muatan lokal, pendidikan kedamaian melalui program penguatan karakter atau dialog lintas iman, sedangkan pendidikan inklusif diwujudkan lewat kebijakan akses sekolah dan fasilitas. Perbedaan jalur masuk inilah yang sering menyebabkan implementasi berjalan sendiri-sendiri, padahal integrasi akan jauh lebih efektif.

Dalam perumusan kebijakan nasional, pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif sesungguhnya memiliki pijakan filosofis yang kuat dalam ideologi Pancasila. Sejalan dengan pandangan Banks (2015), Galtung (1996), dan UNESCO (2020), pendidikan multikultural selama ini lebih banyak dipromosikan pada tataran normatif melalui semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang seharusnya dioperasionalkan dalam praktik pembelajaran sebagai pengejawantahan sila ke-3, *Persatuan Indonesia*. Pendidikan kedamaian yang kerap hadir dalam agenda resolusi konflik dan pencegahan radikalisme sesungguhnya merupakan aktualisasi sila ke-2 dan sila ke-5, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* serta *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, yang mewajibkan pengelolaan konflik secara dialogis dan non-kekerasan. Sementara itu, pendidikan inklusif yang memperoleh legitimasi kuat dari konvensi internasional seperti CRPD yang telah diratifikasi

Indonesia, pada hakikatnya selaras dengan sila ke-1 dan sila ke-5: penghormatan martabat setiap manusia tanpa diskriminasi merupakan manifestasi nilai Ketuhanan dan keadilan sosial yang menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi semua warga negara.

Dengan demikian, meskipun ketiga pendekatan tersebut memiliki basis kebijakan yang berbeda—multikultural berbasis identitas kebangsaan, pendidikan kedamaian berbasis agenda keamanan sosial, dan inklusif berbasis sistem hak asasi manusia, argumen penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila menyediakan kerangka integratif yang memungkinkan ketiganya diformulasikan dalam satu desain kebijakan pendidikan nasional yang utuh. Melalui pendekatan ini, integrasi ketiganya bukan sekadar mengikuti arus global atau komitmen regulasi internasional, tetapi merupakan strategi ideologis untuk mewujudkan karakter pendidikan Indonesia yang berkeadaban, toleran, damai, dan menjamin partisipasi setara dalam semangat nasionalisme konstitusional.

Jika ditinjau dari urgensinya, Nieto (2010); UNESCO (2020) mengungkapkan perbedaan strategi tersebut bukanlah kelemahan, melainkan peluang untuk merancang peta integratif pendidikan Nasional. Pendidikan multikultural memberi landasan nilai, pendidikan kedamaian membekali keterampilan, dan pendidikan inklusif memastikan akses yang adil. Tanpa perpaduan ini, pendidikan Indonesia akan cenderung parsial dan gagal menjawab kompleksitas masyarakat.

Dengan demikian, memahami perbedaan prinsip, tujuan, dan strategi pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif bukan sekadar analisis akademik, melainkan langkah krusial dalam membangun sistem pendidikan yang relevan dengan realitas Indonesia. Keberagaman etnis, pengalaman konflik, serta kebutuhan kelompok marjinal menuntut pendekatan integratif, bukan sekadar sektoral. Hal ini menegaskan bahwa riset lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model pendidikan yang memadukan ketiga perspektif tersebut secara sistematis.

Urgensi Penerapan Pendidikan Multikultural, Kedamaian, dan Inklusif secara Komplementer di Indonesia

Indonesia sebagai bangsa majemuk menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Fenomena intoleransi, diskriminasi, serta potensi konflik sosial menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih integratif. Pendidikan multikultural menekankan penghargaan terhadap keberagaman, pendidikan kedamaian mengajarkan keterampilan resolusi konflik, dan pendidikan inklusif menekankan kesetaraan akses. Ketiga pendekatan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan perlu dipadukan secara komplementer agar menghasilkan transformasi sosial yang utuh (Banks, 2015). Dengan cara itu, pendidikan dapat menjadi ruang aman untuk menumbuhkan sikap saling menghargai sekaligus membangun solidaritas sosial.

Tidak ada analisis mengenai keterbatasan, kontradiksi, atau tantangan implementasi dari ketiga pendekatan tersebut. Perlu untuk ditambahkan terkait benturan antara budaya sekolah dengan pendidikan inklusif, atau antara pendidikan multicultural dengan praktik Nasional.

Urgensi penerapan ketiga pendekatan pendidikan tersebut semakin tampak ketika berbagai kasus intoleransi dan eksklusi sosial di sekolah maupun masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan realitas praktik. Penelitian Santoso (2018) menegaskan bahwa salah satu pemicu konflik antarkelompok di Indonesia adalah rendahnya pemahaman mengenai keberagaman serta lemahnya kemampuan resolusi konflik generasi muda. Namun, implementasi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif tidak bebas dari kontradiksi. Dalam praktiknya, pendidikan multikultural sering berbenturan dengan narasi nasionalisme homogen yang menekankan keseragaman simbolik, misalnya dalam bahasa, pakaian, atau ekspresi keagamaan, sehingga keberagaman dipahami sebatas toleransi simbolik, bukan penerimaan substantif. Pendidikan kedamaian pun menghadapi tantangan karena budaya sekolah yang masih hierarkis dan berorientasi hukuman sering kali tidak menyediakan ruang dialog reflektif dan penyelesaian konflik secara restoratif. Demikian pula, pendidikan inklusif kerap terhambat oleh budaya institusional yang masih menempatkan penyandang disabilitas atau kelompok minoritas sebagai “beban” alih-alih warga belajar yang setara, ditambah keterbatasan guru dalam menerapkan pedagogi diferensiatif.

Oleh karena itu, posisi artikel ini menegaskan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut tidak cukup dibangun melalui kebijakan normatif, tetapi membutuhkan transformasi paradigma pendidikan yang lebih struktural, mulai dari kurikulum, kapasitas pendidik, hingga budaya sekolah. Tanpa perubahan mendasar tersebut, pendidikan akan tetap berpusat pada transfer kognitif dan gagal mempersiapkan peserta didik menghadapi kompleksitas masyarakat plural. Dengan kata lain, tantangan implementasi justru memperkuat tesis bahwa integrasi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif bukan sekadar ideal teoretis, tetapi kebutuhan strategis untuk mencegah reproduksi kekerasan simbolik, diskriminasi, dan konflik sosial dalam ruang pendidikan Indonesia.

Pendidikan multikultural berfungsi menumbuhkan kesadaran kritis tentang pluralitas. Namun tanpa didukung pendidikan kedamaian, kesadaran tersebut bisa berhenti pada pengakuan formal tanpa keterampilan praktis dalam mengelola konflik. Di sisi lain, pendidikan inklusif menjamin tidak ada kelompok yang tertinggal dari akses pembelajaran. Dengan demikian, keterpaduan ketiganya menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh: menghargai perbedaan, membangun perdamaian, dan memastikan keadilan sosial (Tilaar, 2004).

Belum dijelaskan bagaimana setiap sila Pancasila terhubung dengan nilai multikultural, perdamaian, dan inklusif secara konseptual.

Penting dicatat bahwa integrasi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif memiliki landasan yang sangat kuat dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* menegaskan penghormatan terhadap martabat setiap pemeluk agama, menjadi dasar pendidikan kedamaian dan inklusif yang menolak segala bentuk diskriminasi berbasis keyakinan. Sila *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* memperkuat prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman, yang merupakan inti dari pendidikan multikultural dan inklusif. Sila *Persatuan Indonesia* mendorong pendidikan multikultural untuk mengelola perbedaan identitas budaya sebagai

kekuatan pemersatu bangsa, bukan sumber konflik. Sila *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan* menjadi basis dialogis bagi pendidikan kedamaian dalam membangun budaya musyawarah, resolusi konflik, dan demokrasi di sekolah. Sementara itu, sila *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* menegaskan kewajiban negara dan institusi pendidikan untuk menjamin akses dan partisipasi setara bagi setiap peserta didik, tanpa pengecualian.

Dengan demikian, penerapan ketiga pendekatan tersebut bukan hanya kebutuhan praktis untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, tetapi juga merupakan panggilan ideologis untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan. Pandangan Magnis-Suseno (2016) menegaskan bahwa pendidikan yang berakar pada Pancasila akan melahirkan warga negara yang toleran, demokratis, dan berkeadaban. Karena itu, jika pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif dipadukan secara sinergis, maka pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan generasi yang berpengetahuan, tetapi juga berkarakter humanis, mampu hidup dalam keberagaman, serta menjaga kohesi sosial sebagai bentuk kecintaan terhadap Tanah Air.

Dari perspektif global, UNESCO (2015) menekankan pentingnya *Global Citizenship Education* yang menggabungkan nilai multikulturalisme, perdamaian, dan inklusivitas. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut bukan hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagian dari tren pendidikan dunia. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh penerapan pendidikan yang mampu merawat keberagaman dan perdamaian.

Secara empiris, banyak konflik sosial di Indonesia berawal dari perbedaan identitas yang dipolitisasi. Jika pendidikan tidak berperan sebagai ruang pembelajaran damai, maka sekolah justru bisa menjadi arena reproduksi diskriminasi (Wahid Foundation, 2019). Integrasi pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif akan mencegah potensi itu dengan membangun kesadaran kritis dan sikap empatik sejak dini. Artinya, pendidikan berfungsi sebagai preventive tool terhadap konflik sosial.

Dalam konteks strategi kebijakan, urgensi integrasi pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif memang harus tercermin dalam kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan materi kontekstual yang relevan dengan dinamika sosial di lingkungannya. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut belum otomatis menghasilkan penguatan nilai multikultural, kedamaian, dan inklusif karena belum tersedia kerangka konseptual maupun indikator capaian pembelajaran yang secara eksplisit memastikan ketiga pendekatan tersebut diintegrasikan ke dalam perencanaan pembelajaran dan kultur sekolah. Akibatnya, implementasi di lapangan masih bergantung pada preferensi guru, pemahaman sekolah, dan konteks sosial setempat—sehingga penerapannya bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan perlu merumuskan peta jalan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa nilai multikultural (pengakuan dan penghargaan atas keberagaman), nilai kedamaian (kompetensi resolusi konflik dan dialog), serta nilai inklusivitas (akses dan partisipasi setara) hadir dalam kurikulum inti maupun kegiatan kesiswaan secara menyeluruh (Kemendikbudristek, 2021).

Namun, penguatan kebijakan saja tidak cukup. Penerapan ketiga pendekatan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Secara kebijakan, beban administrasi dan tekanan pencapaian hasil akademik sering membuat sekolah menomorduakan pengembangan nilai-nilai sosial. Secara kultural, masih banyak sekolah yang mempertahankan budaya disiplin koersif, kompetisi berlebihan, serta homogenitas ekspresi budaya tertentu sebagai representasi “nasionalisme” sehingga gagasan multikultural dan inklusif dianggap mengganggu stabilitas sekolah. Selain itu, kapasitas guru dalam menerapkan pedagogi diferensiasi, pembelajaran berbasis dialog, dan manajemen kelas inklusif masih belum merata. Resistensi ini menunjukkan bahwa integrasi ketiga pendekatan membutuhkan perubahan paradigma yang lebih mendasar daripada sekadar penambahan konten kurikuler.

Di sisi lain, ketika kebijakan dan praktik dapat diselaraskan, keterpaduan pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif berpotensi memperkuat modal sosial bangsa. Putnam (2000) menjelaskan bahwa social capital seperti kepercayaan, norma saling menghargai, serta kerja sama lintas identitas merupakan perekat yang mencegah polarisasi dan konflik. Pendidikan yang komplementer tidak hanya membangun human capital berupa kecakapan akademik, tetapi juga social capital sebagai pondasi keberlanjutan kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, keberhasilan integrasi ketiga pendekatan ini tidak hanya bermakna bagi peningkatan kualitas peserta didik, tetapi juga untuk menjaga ketahanan sosial dan keutuhan nasional di tengah kompleksitas demokrasi dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Keterpaduan pendekatan ini juga mendukung pembangunan social capital. Menurut Putnam (2000), modal sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dapat memperkuat kohesi masyarakat. Pendidikan yang komplementer tidak hanya membangun human capital berupa keterampilan individu, tetapi juga *social capital* yang menjadi pondasi penting bagi bangsa. Dengan demikian, pendidikan dapat memutus rantai polarisasi sosial yang belakangan semakin kuat di Indonesia.

Tabel berikut memperlihatkan urgensi ketiga pendekatan secara komplementer dalam konteks Indonesia:

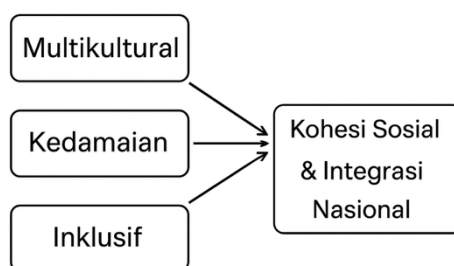
Tabel 3. Urgensi Penerapan Pendidikan Komplementer

Pendekatan	Fokus Utama	Kontribusi dalam Konteks Indonesia
Multikultural	Penghargaan budaya	Mengurangi intoleransi
Kedamaian	Resolusi konflik	Mencegah kekerasan sosial
Inklusif	Kesetaraan akses	Menghapus diskriminasi pendidikan
Komplementer (Integrasi)	Sinergi nilai	Membangun kohesi sosial nasional

Urgensi juga terlihat dari sisi psikologis. Penelitian Hasan (2020) menunjukkan bahwa siswa yang belajar dalam lingkungan multikultural dan inklusif memiliki tingkat empati dan toleransi yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar di lingkungan homogen. Jika aspek kedamaian turut dipadukan, maka generasi muda bukan hanya mampu menerima perbedaan, tetapi juga berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini sejalan dengan konsep *peaceful personality development* dalam psikologi pendidikan.

Selain itu, penerapan ketiga pendekatan secara komplementer mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendidikan berkualitas (SDG 4) tidak cukup hanya meningkatkan literasi dan numerasi, tetapi juga harus membentuk warga global yang toleran dan damai. SDG 16 yang menekankan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat akan sulit dicapai tanpa basis pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai motor pencapaian agenda global (UNESCO, 2020).

Grafik berikut menggambarkan posisi pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif sebagai fondasi komplementer untuk kohesi sosial di Indonesia:



Grafik 2. Integrasi Pendidikan Multikultural, Kedamaian, dan Inklusif

Dengan melihat berbagai urgensi di atas, jelas bahwa integrasi pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif harus menjadi prioritas kebijakan pendidikan Indonesia. Pendidikan bukan sekadar alat transfer ilmu, tetapi juga instrumen transformasi sosial. Integrasi ketiganya memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berempati, toleran, dan siap menjaga perdamaian. Jika diterapkan secara konsisten, maka pendidikan Indonesia akan mampu menghadirkan warga negara yang tidak hanya memahami pluralitas, tetapi juga menjadikannya modal untuk membangun peradaban damai dan adil.

Implikasi Empiris dan Kebijakan

Hasil analisis terhadap kebijakan pendidikan, laporan penelitian, dan literatur akademik menunjukkan bahwa sekolah dan institusi pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan atau problem serius dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang adil, damai, dan inklusif. Tantangan pertama adalah persistensi praktik diskriminasi berbasis identitas. Berbagai studi mengungkap bahwa perundungan, stereotip etnis, pengucilan siswa berkebutuhan khusus, serta perlakuan berbeda berdasarkan agama atau bahasa masih terjadi di ruang-ruang kelas. Bentuk diskriminasi ini tidak selalu

tampak dalam tindakan yang eksplisit, tetapi sering hadir dalam praktik sehari-hari, misalnya pelabelan negatif, pengelompokan berdasarkan kemampuan secara kaku, hingga bias dalam pemberian sanksi maupun penghargaan.

Tantangan kedua terkait keterbatasan kapasitas guru dalam mengelola keberagaman dan konflik. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pedagogi multikultural, strategi resolusi konflik, dan pendekatan pembelajaran inklusif. Kurikulum pendidikan guru cenderung menitikberatkan aspek akademik sehingga kompetensi sosial dan emosional kurang diperhatikan. Akibatnya, sebagian guru tidak memiliki kerangka pedagogis yang kuat untuk menciptakan ruang kelas yang sensitif terhadap perbedaan atau menangani ketegangan antarsiswa.

Tantangan ketiga adalah minimnya kebijakan operasional di tingkat sekolah yang secara sistematis mendukung budaya damai dan inklusi. Walaupun terdapat kebijakan nasional yang memuat prinsip toleransi dan pendidikan inklusif, banyak sekolah belum memiliki pedoman implementasi yang konkret dan terukur. Penanganan konflik sering bersifat ad hoc dan lebih menekankan disiplin ketimbang pendekatan restoratif yang membangun pemahaman dan rekonsiliasi.

Temuan ini menegaskan bahwa integrasi pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif bukan sekadar tuntutan normatif, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika pluralitas Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian mengimplikasikan perlunya kebijakan kurikulum yang responsif terhadap keberagaman; peningkatan pelatihan guru terkait toleransi, mediasi konflik, dan pedagogi diferensiasi; serta penguatan budaya sekolah yang mempromosikan solidaritas dan kohesi sosial.

SIMPULAN

Pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Pendidikan multikultural menekankan pentingnya pengakuan identitas, toleransi, serta penghargaan terhadap keragaman. Pendidikan kedamaian berfokus pada pembentukan sikap damai, kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, serta menciptakan harmoni sosial. Sementara itu, pendidikan inklusif mengedepankan kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan semua individu, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan.

Perbedaan prinsip, tujuan, dan strategi pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda, ketiganya saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan yang adil, humanis, dan demokratis. Pendidikan multikultural berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, serta agama; pendidikan kedamaian menekankan keterampilan resolusi konflik, empati, dan pengelolaan perbedaan tanpa kekerasan; sementara pendidikan inklusif memastikan akses dan partisipasi setara bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Tujuan ketiganya pun beragam: membangun toleransi, menciptakan budaya damai, serta menjamin kesetaraan kesempatan belajar. Strateginya pun khas, mulai

dari integrasi kurikulum tentang keragaman, praktik simulasi resolusi konflik, hingga penyesuaian pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Urgensi penerapan pendidikan multikultural, kedamaian, dan inklusif secara komplementer di Indonesia terletak pada kemampuannya menjawab tantangan kebangsaan yang majemuk, rawan konflik, dan masih sarat diskriminasi. Ketiganya, bila dipadukan, menghadirkan pendekatan transformatif yang tidak hanya menumbuhkan toleransi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, membangun kohesi Nasional, serta menyiapkan generasi muda yang cerdas, empatik, dan demokratis. Integrasi ini selaras dengan nilai Pancasila, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat modal sosial bangsa, sehingga pendidikan berfungsi bukan sekadar sebagai transfer ilmu, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga persatuan dan membangun peradaban damai serta adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. A., & Shultz, L. (2008). *Educating for human rights and global citizenship*. SUNY Press.
- Ainscow, M., & Miles, S. (2009). Developing inclusive education systems: How can we move policies forward? *Prospects*, 38(1), 5–20.
- Ainscow, M. (2000). *Reaching out to all learners: Some opportunities, challenges and dilemmas*. Manchester University Press.
- Anderson, B. (2017). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Anwar, D. F. (2016). Indonesia's pluralism tested: Between radical Islam and ethnic conflict. *Southeast Asian Affairs*, 16(1), 101–118.
- Azra, A. (2007). Pendidikan kewargaan multikultural: Konteks Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 163–180.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139.
- Banks, J. A. (2009). *Multicultural education: Dimensions and paradigms*. In J. A. Banks (Ed.), *The Routledge international companion to multicultural education* (pp. 9–32). Routledge: New York.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education*. Routledge: New York.
- Banks, J. A. (2016). Failed citizenship and transformative civic education. *Educational Researcher*, 45(7), 366–377.
- Banks, J. A. (2017). Citizenship education and global migration: Implications for theory, research, and teaching. *American Educational Research Journal*, 54(1).
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewey, J. (2016). *Democracy and education*. Free Press. Original work published 1916.
- Ence, E., Mas'ud, F., Tonis, M., Payong, E. W., Openg, W. F. K., & Laga, O. E. (2025). Membangun Karakter Moral Melalui Pendidikan Etika Di Sekolah. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 247–260.
- Florian, L. (2014). What counts as evidence of inclusive education? *European Journal of Special Needs Education*, 29(3), 286–294.
- Fraser, N. (2000). Rethinking recognition. *New Left Review*, 3(3), 107–120.

- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury Publishing. (Original work published 1970).
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage.
- Galtung, J. (2012). *A theory of peace: Building direct, structural and cultural peace*. Transcend University Press.
- Giroux, H. A. (2005). *Border crossings: Cultural workers and the politics of education*. Routledge.
- HAM, K. (2022). *Laporan tahunan Komnas HAM 2022*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Harris, I. M., & Morrison, M. L. (2013). *Peace education (3rd ed.)*. McFarland.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hidayat, R. (2020). Pendidikan multikultural dan tantangan keberagaman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1), 45–58.
- Izhatullaili, I., Mas' ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi Keadilan di Era Media Sosial: No Viral No Justice dalam Kontroversi Bupati Pati. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 1-9.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2005). Essential components of peace education. *Theory into Practice*, 44(4), 280–292.
[https://doi.org/\[https://doi.org/10.1207/s15430421tip4404_3\]\(https://doi.org/10.1207/s15430421tip4404_3\)](https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15430421tip4404_3
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9-14.
- Mahfud, C. (2011). *Pendidikan multikultural*. Pustaka Pelajar.
- Mahfud, C. (2020). Relevansi pendidikan multikultural dalam era digital. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 133–145.
- Mas' ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11-19.
- Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9-21.
- Mas' ud, F., & Wibowo, I. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. *Media Sains*, 25(1), 27-31.
- Mas' ud, F., Medan, K. K., & Wibowo, I. (2025). Hak Kewarganegaraan Imigran Afghanistan di Kota Kupang dalam Perspektif Teori Hak Asasi Manusia. *Global Academical Journal*, 5(2), 1-8.
- Mas' ud, F., Kale, D. Y. A., Gero, H. M. E., Kolianan, J. B., Sabariman, H., & Peranginangin, I. I. (2025). *Studi Masyarakat Indonesia. Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Mas' ud, F., Roen, Y. A., Kolianan, J. B., & Istianah, A. (2025). *Sosiologi Indonesia. Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Misgiyati, M., Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Etnomatika dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Inovasi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Civic Competence. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 10-18.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nieto, S. (2010). *The light in their eyes: Creating multicultural learning communities*. Teachers College Press.
- Nilan, P. (2019). Multicultural education and youth identities in Indonesia. *Asian Education and Development Studies*, 8(2), 131–146.
- Noddings, N. (2018). *Peace education: How we come to love and hate war*. Cambridge

University Press.

- Paulina, M., Dwiputra, R., Mas' ud, F., & Taneo, K. L. F. (2025). Civic Ecology dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Penguatan Kesadaran Ekologis melalui Konservasi Hutan Pulau Timor. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 19-27.
- Ridhoh, M. Y., Dwiputra, R., & Paotonan, N. (n.d.). *MANAJEMEN WARGANEGARA DI TENGAH ARUS VUCA: KONSEP, RELEVANSI, URGENSI DAN IMPLEMENTASI CITIZENSHIP MANAGEMENT AMID THE VUCA TIDE: CONCEPT, RELEVANCE, URGENCY, AND IMPLEMENTATION*.
- Sugiharto, B. (2017). Pendidikan kedamaian dalam konteks Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 77–89.
- Sunardi. (2018). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar Indonesia. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 2(1), 1–12.
- Suparlan, P. (2018). Pendidikan multikultural di Indonesia: Sebuah kajian kritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 23(4), 345–359.
- Supriyadi, D. (2021). Pendidikan multikultural dan resolusi konflik di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 23–35.
- Supriyanto, A., & Wulandari, R. (2021). Diskriminasi dalam praktik pendidikan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 144–157.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan*. Rineka Cipta.
- UNESCO. (2014). *Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?* UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education*. <https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion>
- Wibowo, I., Noe, W., Mas' ud, F., & Kale, D. Y. A. (2025). Pendidikan Moral Berbasis Pancasila Sebagai Antitesis Perilaku Echo Chamber di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Khairun. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 78-86.